

## REKAP 1: K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2025

#### 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

#### 2. VISI

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

#### 3. MISI

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyaluran pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

#### 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	5.150.000,0
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2.000.000,0
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.000.000,0
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	11.300.000,0
06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3.086.715,0
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	190.699.167,0
08	Memperkuat Penyaluran Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	12.500.000,0
<b>Total</b>		<b>225.735.882,0</b>

#### 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		146.489.125,0
01.01	Indeks Demokrasi Indonesia	78,66	
01.02	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5%	
01.03	Indeks Kinerja Ormas	66	
02	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		11.476.628,0
02.01	Indeks Harmoni Indonesia	6,3	
03	Meningkatnya kewaspadaan nasional		6.000.000,0
03.01	Indeks Kewaspadaan Nasional	64,0	
04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas		0,0
04.01	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150,0	
05	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri		701.032.166,0
05.01	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	80,0	
05.02	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	
05.03	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Nilai 3 (100%)	
05.04	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	3,6	
06	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah		5.000.000,0
06.01	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	
07	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif		256.833.824,0
07.01	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	
07.02	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
07.03	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	100,0	
07.04	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	
07.05	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4	
07.06	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	68	
07.07	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36,0	
07.08	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	100,0	
07.09	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
07.10	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
08	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		2.120.117.603,0
08.01	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	
08.02	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.	1.500 Lembaga Pengguna	
09	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		137.236.287,0
09.01	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	60,0	
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		1.397.189.092,0
10.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	A (Memuaskan)	
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		7.471.746,0
11.01	Indeks pengawasan Internal	100	
11.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	85,0	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		5.950.000,0
12.01	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	50%	
Total			4.794.796.471,0

#### 6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
010.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	381.600.958,0	37.358.577,0	0,0	51.644.047,0	0,0	0,0	2.086.715,0	0,0	0,0	0,0	472.690.297,0	750,0	850,0	920,0
010.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	654.965.603,0	0,0	0,0	1.465.152.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.120.117.603,0	0,0	0,0	0,0
010.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	163.965.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.965.753,0	0,0	0,0	0,0
010.WA	Program Dukungan Manajemen	2.026.646.980,0	11.375.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.038.022.818,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		3.227.179.294,0	48.734.415,0	0,0	1.516.796.047,0	0,0	0,0	2.086.715,0	0,0	0,0	0,0	4.794.796.471,0	750,0	850,0	920,0